



Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**KEBIJAKAN INGGRIS DALAM MENYELESAIKAN
PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)
GOOGLE INCORPORATION DI INGGRIS**

SKRIPSI

Oleh:

Michelle Oksana Ang

2014 330 083

Bandung

2018

No. Kode	HI ANG K/18
Tanggal	19 Februari 2019
No. Ind.	6462 - FISIP / SKP 37058
Divisi	
Hasil / Ben	
Dari	FISIP



Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**KEBIJAKAN INGGRIS DALAM MENYELESAIKAN
PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)
GOOGLE INCORPORATION DI INGGRIS**

SKRIPSI

Oleh:

Michelle Oksana Ang

2014 330 083

Pembimbing:

Giandi Kartasasmita, S.Ip., M.A.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Michelle Oksana Ang
Nomor Pokok : 2014330083
Judul : Kebijakan Inggris Dalam Menyelesaikan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Google Incorporation di Inggris

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 25 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Stanislaus R. Apresian, S.IP., M.A. :

Anggota

Dr.A.Irawan Justiniarto H. :

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Michelle Oksana ang
NPM : 2014330083
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kebijakan Inggris Dalam Menyelesaikan
Penghindaraan Pajak (Tax Avoidance)
Google Incorporation di Inggris

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Agustus 2018



Michelle Oksana Ang



DAFTAR ISI

	hal
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kajian Literatur.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data.....	25
1.6.1 Metode Penelitian.....	25
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.7 Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II PERKEMBANGAN PERUSAHAAN BERBASIS INTERNET DAN PERANGKAT LUNAK SERTA SEJARAH DAN PERKEMBANGAN GOOGLE CORPORATION.....	29
2.1. Perkembangan Perusahaan Internet dan Perangkat Lunak.....	29
2.2. Sejarah dan Perkembangan Google Corporation.....	38
2.2.1. Sejarah Google Corporation.....	39
2.2.2. Perkembangan Google Corporation.....	41
BAB III SISTEM PERPAJAKAN INGGRIS DAN UPAYA-UPAYA PEMERINTAH INGGRIS DALAM MENANGANI KASUS PENGHINDARAN PAJAK GOGGLE COROPRATION.....	48
3.1. Sistem Perekonomian dan Perpajakan Inggris.....	49

3.1.1. Sistem Perekonomian Inggris.....	49
3.1.2. Sistem Perpajakan Inggris.....	52
3.2. Kasus Penghindaran Pajak Google Corporation di Inggris.....	57
3.3. Upaya-upaya Pemerintah Inggris Dalam Menangani Kasus Tax Avoidance Google Corporation di Inggris.....	68
BAB IV PENUTUP.....	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR DIAGRAM

	hal
Diagram 1.1. Perkembangan Perekonomian Inggris Periode 1998-2013.....	3
Diagram 3.1. Prosentase Penerimaan Pajak di Inggris Tahun 2010-2015.....	55
Diagram 3.2. Perbandingan Pendapatan Pajak Inggris Dengan OECD dan Kelompok Uni Eropa 15.....	57
Diagram 3.3. Pendapatan, Penghasilan dan Pajak Google Inggris (Juta Pundsterling).....	65
Bagan 3.1. Struktur ATS (<i>Agrresive Tax Structuring</i>).....	74

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1. Kasus Pengembangan Instrumen Teknologi Dari Disruptee ke Disruptive.....	31
Tabel 2.2. Keuntungan Google Tahun 2006-2015.....	44
Tabel 3.1. Pendapatan Pajak dan Prosentase Terhadap Penerimaan Nasional Inggris Tahun 2000-2015.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinamika ekonomi-politik global telah berkembang secara kompleks meninggalkan sistem konvensional ke arah moderen dengan mengedepankan sistem produksi dan pemasaran dengan mengedepankan telekomunikasi berbasis internet. Sejak ditemukan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat perkembangan internet semakin pesat dan akhirnya dapat digunakan oleh berbagai elemen, baik sektor manufaktur, pemerintah, perbankan, hingga masyarakat secara luas.

Teknologi bergerak dengan sangat cepat, dan di dalam banyak arah, yang menjeri tantangan untuk bahkan diperhatikan sehingga manusia sering menjadi korban kelelahan *'next new thing'*. Di seluruh dunia, ratusan juta orang telah terangkat dari kemiskinan karena negara-negara berkembang telah mengadopsi teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi maju di masa lalu. Salah satu pola bisnis yang paling konsisten adalah kegagalan perusahaan terdepan untuk tetap berada di puncak industri ketika teknologi atau pasar berubah.¹ Saat ini, teknologi seperti Internet bergerak membantu mempercepat pembangunan ekonomi, yang

¹ Joseph L. Bower and Clayton M. Christensen, *Disruptive Technologies: Catching the Wave*, Harvard Business Review January-February 1995, hal.28.

memungkinkan jutaan orang di daerah terpencil berkembang untuk melompati ekonomi global abad ke-21.²

Memasuki abad 21 dunia dihadapkan pada tatanan baru yaitu globalisasi. Pada masa ini teknologi-informasi dunia semakin lazim menggunakan media internet, baik pada sektor swasta, perbankan, hingga layanan pemerintah. Pada awalnya sistem informasi berbasis internet digunakan oleh kelompok negara maju, khususnya Amerika Serikat dan kemudian berkembang ke negara-negara industri maju lainnya, diantaranya adalah Inggris.

Keberadaan Inggris sebagai salah satu negara maju dunia ternyata juga tidak bisa dilepaskan dari internet, dimana perkembangannya telah ada sejak tahun 1969 hingga 1986. Diperkirakan Inggris menjadi negara pertama, di dunia yang berhasil mengaplikasikan internet setelah Amerika Serikat. Hingga tahun 2016 Inggris memiliki beberapa perusahaan telekomunikasi berbasis internet, diantaranya *BT Group*, *EE Telecommunication*, *The Phone Coop*, *Sky Broadband*, *Talk-Talk* dan beberapa perusahaan lainnya.³

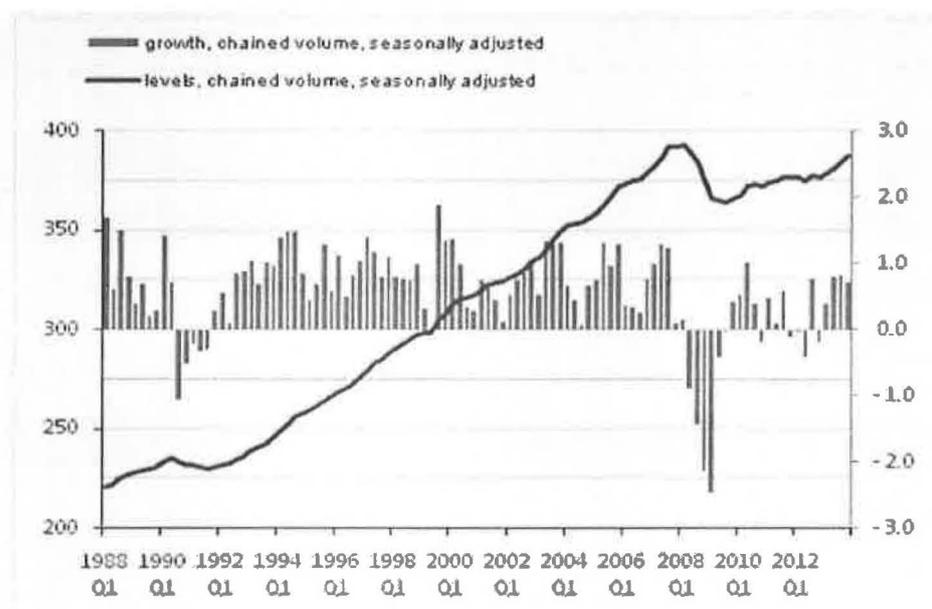
Kemajuan dunia internet di Inggris kemudian berpengaruh pada dinamika ekonomi dan industri negara ini yang terus berkembang secara progresif. Ini tidak lepas dari semakin efektifnya penggunaan internet sehingga dapat memudahkan

² McKinsey Global Institute, *Disruptive technologies: Advances That Will Transform Life, Business, and the Global Economy*, McKinsey & Company, New York, 2013, hal.56.

³ "United Kingdom Guide : Internet Acces in UK", dalam <https://www.justlanded.com/english/UnitedKingdom/UK-Guide/Telephone-Internet/Internet-access-in-the-UK>, diakses pada 8 Maret 2018.

mobilitas dan pengiriman bahan baku, kemudahan konsumen untuk memperoleh barang dan kebutuhan secara cepat dari pencarian informasi dan direct shopping ataupun untuk mengurus perizinan secara cepat. Gambaran tentang hal ini lihat diagram 1.1. sebagai berikut :

Diagram 1.1.
Perkembangan Perekonomian Inggris Periode 1998-2013



Source: Office for National Statistics

Sumber : "Bank of England", dalam <https://www.economicshelp.org/blog/7032/economics/bank-of-england-criticisms/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perekonomian Inggris dalam jangka pendek cenderung mengalami fluktuasi, sedangkan dalam jangka panjang kondisi ini terus meningkat. Pencapaian ini ternyata tidak lepas dari berbagai kontribusi sektor swasta, khususnya industri dan manufaktur. Seiring dengan berkembangnya waktu,

muncul beberapa persoalan yang diakibatkan oleh operasionalisasi perusahaan multinasional di Inggris berkaitan dengan berkembangnya globalisasi internasional yang semakin memberikan pengaruh yang besar terhadap liberalisme-kapitalisme internasional yang sekaligus semakin menurunkan kedaulatan nasional untuk mengontrol kinerja perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dalam beroperasi di Inggris.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Pada dasarnya sebuah negara memiliki ketentuan perundang-undangan dan bentuk-bentuk regulasi lainnya untuk dapat membangun kondisi tertib sipil, serta mewujudkan pencapaian kepentingan nasional secara berkesinambungan. Memasuki era globalisasi, munculnya beberapa perusahaan multinasional ternyata menimbulkan kontrol dan pengawasan negara yang menjadi lemah. Ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, belum tersedianya instrumen perundang-undangan untuk dapat mengakomodasi perusahaan yang menggunakan teknologi informasi sebagai dasat operasional, kedua, berkembangnya tren penggunaan teknologi informasi membuat semakin sulitnya pemantauan oleh otoritas terkait dan ketiga, adanya benturan kepentingan antara entitas-entitas kapitalistik dengan berbagai nilai dan norma yang dijalankan oleh suatu negara.

Kasus penghindaran pajak Google yang terjadi di beberapa negara dunia, diantaranya Italia, Perancis, Spanyol termasuk Inggris. Negara-negara tersebut belum termasuk kelompok negara berkembang, diantaranya Indonesia, India, Thailand, Selandia Baru dan beberapa negara lainnya.

Sejak tahun 2009, *Google Inc.* telah bergabung dalam daftar perusahaan yang menghadapi kritik atas penghindaran pajak setelah rekening publik menunjukkan bahwa hanya membayar £ 600.000 untuk pajak korporasi Inggris meskipun pendapatan lokal lebih dari £ 1,25 miliar. Sebuah tinjauan terhadap operasi *Google* di Inggris menunjukkan bahwa mesin pencari web bisa menghadapi pajak lebih dari £ 100 juta di negara ini, namun *Google* menghindarinya dengan menyalurkan pendapatan melalui Irlandia.⁴

Berdasarkan pada laporan dari Komite sebelumnya mengenai kasus pajak *Google* di bulan Juni 2013 menyimpulkan bahwa *Google* menggunakan struktur pajak palsu yang ditujukan untuk menghindari pajak Inggris. *Google* merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan Inggris sebagai pasar utama bagi *Google* meskipun keuntungan besar yang diperoleh tidak sesuai dengan sistem perpajakan Inggris.⁵

Setelah melalui berbagai kebijakan dan upaya pada akhirnya pemerintah Inggris berhasil menarik pajak dari *Google* pada awal tahun 2016. Pada awalnya

⁴ Terry Macalister, Google is accused of UK tax avoidance, *The Guardian* 20 April 2009, diakses 25 September 2017 dari: <https://www.theguardian.com/technology/2009/apr/20/google-uk-tax-avoidance>

⁵ HC Committee Of Public Accounts, Tax Avoidance—Google, Ninth Report of Session 2013–14, HC 112, June 2013, Conclusions and recommendations para 1

Google menyatakan sikapnya bahwa di Inggris kinerja perusahaan ini bukan merupakan Badan Usaha Tetap (BUT), namun hanya ekspansi dari perusahaan induk di negara lain. Keberhasilan Inggris dalam menanggapi penghindaran pajak ini sekaligus menjadi babak baru bagi terciptanya sistemisasi perpajakan perusahaan berbasis internet, perangkat lunak dan peralatan telekomunikasi yang berguna untuk menanggapi perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama diantaranya Facebook, Twitter dan lain-lainnya.⁶

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi masalah mulai dari *Google* mendirikan Kantor Cabangnya di Inggris di awal tahun 2005 hingga penyelesaian kasusnya di tahun 2016. Dipilih periode tersebut karena menjadi rentang waktu yang menunjukkan kasus tax avoidance oleh *Google*, serta berbagai upaya yang dijalankan pemerintah Inggris untuk dapat menarik pajak dari perusahaan ini.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis dapat menarik rumusan masalah yaitu :

“Bagaimana upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Inggris dalam menanggapi penghindaran pajak yang dijalankan oleh *Goggle Corporation* di Inggris ?”

⁶ *Ibid*,

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis berbagai peran dan upaya-upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Inggris dalam menangani penghindaran pajak yang dijalankan oleh Goggle Corporation di Inggris.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat membantu peneliti lain untuk dapat mengetahui sejauh mana dampak yang telah ditimbulkan oleh *disruptive technology* sendiri dan mengidentifikasi langkah langkah apa saja yang sudah diambil negara dalam menanggapi fenomena yang terjadi. Kemudian masalah ini sangat erat dikaitkan dengan isu perpajakan yang terkait dengan perusahaan perusahaan swasta. Penelitian ini dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dunia dengan adanya perkembangan teknologi yang mempengaruhi aspek hukum. Penelitian ini juga merupakan tempat untuk menerapkan ilmu Hubungan Internasional yang telah didapat selama berkuliah di Jenjang Strata 1 (S1). Ilmu-ilmu Hubungan Internasional dapat diterapkan di penelitian ini mulai dari konsep dan pengaplikasiannya terhadap suatu kasus.

1.4. Kajian Literatur

Penelitian pertama oleh Silvia Novaes Zilber, Francisco Lourenço da Silva (2011), yang meneliti tentang "*Multinational Innovation Strategy to the Bottom of*

Pyramid in Brazil". Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang fenomena kenaikan kelas daya beli yang rendah di pasar konsumen ekonomi yang sedang berkembang dan strategi pertumbuhan dan inovasi yang digunakan di pasar tersebut untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di sana untuk sukses di pasar tersebut. Konsep *disruptive innovation* digunakan, untuk memverifikasi apakah perusahaan multinasional tersebut, untuk memperbesar pasar mereka yang secara tradisional menghadapi kelas atas, menggunakan *disruptive innovation* di pasar berkembang yang spesifik ini - Brasil - untuk mencapai kelas yang lebih rendah dengan produk baru. Konsep fokus *disruptive innovation* pada klien bersedia mengkonsumsi produk yang kurang canggih dan memungkinkan menarik klien baru karena pengurangan biaya. Metode studi kasus ini diterapkan pada tiga perusahaan besar yang beroperasi di Brasil, anak perusahaan Multinasional (MNC) yang memproduksi komoditas. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak beroperasi di pasar "Bottom of the Pyramid" (BOP) seperti di negara-negara berkembang lainnya. Perusahaan-perusahaan besar lebih suka mencoba menembus hanya di pasar "Tier 3" di pasar Brasil, karena mereka menganggap bahwa stratifikasi ekonomi di bawah tingkat itu tidak cukup menarik, terutama karena ukurannya yang berkurang.

Penelitian kedua adalah Nico Koop (2011), yang berjudul "the battle between multinational tax avoidance and corporate competitiveness". Studi ini mencari beberapa perusahaan internasional dan mempelajari hubungan mereka dengan tarif pajak perusahaan. Perusahaan terus-menerus menghindari membayar pajak dengan

menggunakan berbagai teknik. Melihat masa lalu, catatan perusahaan-perusahaan ini akan menunjukkan berbagai metodologi yang mereka gunakan untuk mengelola jalan mereka melalui undang-undang pajak. Pemerintah kehilangan pendapatan besar terhadap skema penghindaran pajak ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai melacak perusahaan internasional dan mempertanyakan berbagai cara penghindaran pajak mereka. Dalam tesis ini juga diajukan pertanyaan tentang teknik penghindaran pajak yang berbeda yang digunakan oleh perusahaan internasional dan bagaimana pemerintah nasional yang berbeda mencoba mengendalikannya. Dengan menggunakan data dan statistik dari beberapa jurnal yang kredibel, penelitian ini menunjukkan berbagai cara bahwa perusahaan mentransfer pendapatan mereka dan berapa banyak yang dikenakan pajak di negara asal mereka.

Sejak dekade 1990-an berbagai negara telah berupaya mengembangkan sistem perpajakan secara efektif dan faktual yang ditujukan untuk menghindari tindakan penghindaran pajak. Salah satu upaya diwujudkan melalui otomatisasi layanan melalui grafik dan grafik, juga ditunjukkan perbedaan pendapatan kena pajak yang dimiliki perusahaan di luar negeri yang beroperasi di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan, ada banyak cara yang berbeda sehingga perusahaan multinasional menghindari pembagian pajak perusahaan mereka secara adil. Mereka menerapkan strategi seperti mispricing dan transfer pricing, yang berhubungan dengan ekspor dan impor yang dihasilkan perusahaan. Dengan kedua metode ini perusahaan menerapkan penggunaan havens pajak yang merupakan salah satu alat utama untuk menghindari pajak perusahaan. Tempat berlubuh pajak tersebar di seluruh dunia, dan memberi

insentif besar bagi perusahaan multinasional untuk memperoleh keuntungan lebih tinggi secara signifikan. Perusahaan dapat secara efektif mendapatkan penghematan pajak sekurang-kurangnya 30% dengan merelokasi operasi mereka dan keuntungan ke surga pajak dengan sedikit atau nol tarif pajak perusahaan. Dengan mempertahankan pendapatan tambahan ini, yang seharusnya dibayarkan ke pajak negara, perusahaan dapat menerapkan rencana strategi yang lebih kuat dan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dalam industri mereka. Penghasilan tambahan ini, yang pada dasarnya menguntungkan perusahaan, dapat digunakan untuk mendanai produk baru, membeli mesin baru, melunasi hutang lama, atau digunakan oleh perusahaan dengan cara apa pun sesuai dengan kebutuhan mereka. Semua tindakan ini sangat berharga dan bisa menjadi kunci penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.

Penelitian ketiga oleh Wei Peng yang berjudul *Multinational Tax Base Erosion Problem of the Digital Economy*, meneliti tentang mekanisme pajak Perusahaan Multinasional dalam ekonomi digital, untuk memahami lebih baik mengenai perilaku penghindaran pajak multinasional. Makalah ini menganalisis karakteristik transaksi perdagangan ekonomi digital, dan menunjukkan penyebab erosi pajak di bidang ekonomi digital; kemudian menggabungkan dengan karakteristik sistem pajak China, membahas langkah-langkah yang diambil oleh China untuk menangani penghindaran pajak tersebut dalam ekonomi digital. Peng menyebutkan bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi digital, basis pajak akan terus terkikis. Karena kekhasan Perdagangan Ekonomi Digital: Perdagangan di dunia

maya, tidak ada salinan nyata dari dokumen kontrak. Untuk melacak posisi trading yang dihasilkan dan pastikan itu adalah pendapatan penjualan, pendapatan layanan, biaya penggunaan atau jenis pendapatan lainnya, juga sangat sulit. Perkembangan teknologi baru telah meningkatkan kemungkinan perencanaan pajak untuk menghindari pajak di bidang ini. Dapat diperkirakan bahwa semakin banyak transaksi bisnis tradisional secara bertahap akan beralih ke ekonomi digital. Menghadapi tantangan internasional, otoritas pajak harus segera bekerja sama dengan pemerintah masing-masing dan organisasi internasional untuk mengembangkan kebijakan dan protokol. Arah kebijakan adalah memodifikasi definisi bentuk usaha tetap ekonomi digital; membersihkan aset tidak berwujud dan penggunaan pengaturan transfer risiko dalam peraturan penetapan harga transfer; penyempurnaan aturan CFC.

1.5. Kerangka Pemikiran

Ekonomi Politik Internasional atau EPI merupakan sebuah studi yang memecah anggapan bahwa disiplin ekonomi dan politik merupakan dua aspek yang tidak saling berkaitan, bahkan banyak yang beranggapan bahwa Ekonomi harus dijalankan secara murni atau tanpa campur tangan negara atau aspek politik. Namun, pada faktanya, ketidak hadirannya aspek politik dalam kegiatan perekonomian justru akan mengakibatkan sebuah kekacauan. Hal tersebut terjadi karena menurut Robert Gilpin ekonomi dan keuangan internasional merupakan aspek yang sangat spekulatif, dan tidak terprediksi, sehingga suatu pemerintahan pun dapat menjadi korban atas kesalahan spekulasi dari ketidakpastian. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan

politik suatu pemerintahan dapat digunakan sebagai penyeimbang dalam perekonomian terutama sebagai pengendali krisis, selain itu Gilpin juga menyatakan bahwa penggunaan kebijakan politik sebagai proteksi perdagangan juga dibenarkan.⁷

Pada dasarnya aspek ekonomi dan politik berkaitan erat, namun pada praktiknya ekonomi politik dan ekonomi politik internasional berada pada dua disiplin yang berbeda. Ekonomi politik menurut Adam Smith merupakan cabang ilmu negarawan untuk mengelola perekonomian suatu negara secara bijak. Dapat dikatakan bahwa definisi yang diungkapkan oleh Adam Smith tersebut merujuk kepada ranah domestik perekonomian suatu negara, sedangkan EPI memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas yaitu mengkaji mengenai interaksi antara aktor-aktor negara, non negara, dan pasar global dalam usahanya untuk meningkatkan perekonomian. EPI sendiri mulai dikembangkan sebagai sebuah kajian dalam ilmu Hubungan Internasional pada tahun 1970an di mana titik baliknya ialah runtuhnya sistem Bretton Woods.⁸

Dalam memahami kajian EPI secara lebih dalam, Gilpin mengemukakan tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu Liberalisme, Marxisme, dan Nasionalisme yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut :⁹

⁷ Robert Gilpin, *Global Politic Economy : Understanding The Internatioal Politic Economy Order*, Princenton, 2001, hal.27.

⁸ Gilpin, *Ibid*, hal.45.

⁹ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, Princenton Universioty Press, Princenton, 1994, hal.4.

- a. Pendekatan Liberalisme merupakan pendekatan yang menganggap aspek ekonomi dan politik tidak dapat benar-benar disatukan, hal ini karena tujuan utama dilakukannya kegiatan komersial adalah untuk mencapai keuntungan yang tinggi di mana keuntungan tersebut dapat diperoleh melalui mekanisme pasar, dan para Liberalis salah satunya Adam Smith percaya bahwa pasar mampu mengendalikan, memulihkan, dan menyeimbangkan dirinya sendiri karena ada invisible hands yang mengaturnya, sehingga peran pemerintah dalam pendekatan ini menjadi sangat minim.
- b. Pendekatan Marxisme, pendekatan ini berangkat dari asumsi Karl Marx bahwa ekonomi dan politik merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pemikiran tersebut didasarkan pada pandangannya terhadap sistem kapitalisme di mana perekonomian yang berjalan terlalu bebas menurut Marx justru akan menyebabkan krisis, selain itu ketidaksetaraan kelas yang diakibatkan oleh sistem tersebut juga menimbulkan kerawanan akan konflik, dengan kata lain menurut Jackson & Sorensen (1999) Marx menolak konsep ketidaksetaraan kelas yang diakibatkan oleh paham liberalisme. Menurut pendekatan Marxisme, pemerintah berperan sebagai pengontrol jalannya perekonomian suatu negara dengan mengelola seluruh alat produksi yang ada kemudian mendistribusikan keuntungan kepada seluruh rakyat secara sama rata. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat menjaga kesejahteraan rakyatnya agar tidak timbul konflik atau pertentangan.

- c. Pendekatan Nasionalisme ternyata berkaitan dengan pemikiran realisme yang bersifat *state centric*, sehingga dalam pendekatan ini, aspek yang diutamakan adalah keuntungan negara. Dalam pandangan Nasionalisme, intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam perdagangan untuk mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh oleh negara tersebut, contohnya penetapan kebijakan proteksi perdagangan yang bertujuan agar masyarakat lebih banyak menggunakan produk lokal sehingga kualitas industri lokal kemudian akan meningkat dan siap bersaing dengan produk-produk luar negeri.

EPI merupakan pendekatan yang memiliki suatu capaian yang disebut sebagai *state of the art*. Di mana *state of the art* sendiri dapat didefinisikan sebagai pencapaian tertinggi yang didapat dari pengembangan suatu disiplin ilmu. Dalam kajian EPI sendiri, yang menjadi *state of the art* ialah kemampuannya untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor baik negara maupun non negara dapat menggunakan kekuatannya demi memaksimalkan kepentingan ekonomi dan politiknya, mengingat disiplin ilmu ekonomi sendiri tidak cukup kuat untuk menganalisis hal tersebut.

Berdasar pada paparan teori EPI menurut Robert Gilpin di atas maka dapat dipahami bahwa ekonomi-politik merupakan dua proposisi yang tidak bisa dipisahkan. Jika dikaitkan dengan upaya pemerintah Inggris dalam menyelesaikan persoalan penghindaran pajak oleh Google Corporation maka terdapat campur tangan/intervensi yang kuat dari pemerintah dan para stakeholder lainnya untuk

mendukung pencapaian ekonomi, yang berasal dari potensi pajak itu sendiri.. Jika dihubungkan dengan tiga pendekatan, masing-masing adalah liberalisme, marxisme ataupun nasionalisme maka upaya Inggris dalam menangani penghindaran pajak merupakan bentuk upaya ekonomi-politik pada bidang nasionalisme.

Dalam dinamika internasional yang didukung teknologi komunikasi yang begitu canggih, dampak globalisasi tentu sangat kompleks. Kemajuan teknologi ini akan memungkinkan tiap individu memperoleh informasi dari mana pun dalam waktu yang singkat. Interaksi antar individu juga semakin meningkat dan melampaui batas-batas negara. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkinan juga dapat mengakibatkan perubahan dalam aspek kehidupan, antara lain hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa.

Ada dua hal sekaligus yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi. Pertama, globalisasi informasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang diakibatkan oleh luasnya dan cepatnya jaringan komunikasi. Kedua, semakin menonjolnya peran satuan-satuan kecil dalam masyarakat, seperti suku, golongan, kelompok bahkan individu yang diakibatkan makin mudahnya individu memperoleh

informasi lengkap yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan bagi diri sendiri, kelompok, suku ataupun golongan.¹⁰

Dalam konteks globalisasi, intensitas dan lingkup kompetisi sangat kompetitif dan luas. Pesaing yang dihadapi sebuah perusahaan tidak lagi datang dari kawasan atau wilayah geografis setempat. Tetapi raksasa global dari mancanegara hadir untuk saling berebut pasar, sebagian industri mengalami globalisasi yang dipicu oleh 4 faktor utama yang disebut 4C : *Customers*, *Cost*, *Country*, dan *Competition* yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut :¹¹

1. Faktor pelanggan (*customers drivers*)

Faktor ini merupakan pemicu globalisasi pasar yang paling kuat. Ada lima karakteristik utama pasar internasional yang menyebabkan perusahaan-perusahaan berminat menerapkan strategi pemasaran global :

- a. *Kesamaan kebutuhan konsumen.*
- b. *Pelanggan global.*
- c. *Saluran distribusi global.*
- d. *Transferable marketing.*
- e. *Leadign markets.*

2. Faktor biaya (*cost drivers*)

¹⁰ Sunarso, *Ibid*, hal.227.

¹¹ George Yip, *The Global Strategy On 21 Century*, Prentice Hall, London and New York, 1995, hal.61.

Faktor biaya tergantung pada aspek ekonomi dunia bisnis, seperti sakala ekonomis (*economies of scale*), lingkup ekonomis (*economies of scope*) dan *sourcing advantages*. Sakala ekonomis berupa pengurangan biaya perunit (*unit cost*) bisa diperoleh melalui upaya memasok lebih dari satu pasar luar negeri.

3. Faktor negara (*country drivers*)

Dimasa lampau, hambatan pemerintah terhadap masuknya invesatasi dan perusahaan asing herdampak pada terproteksinya pasar domestik dan tidak berkembangnya pemasaran global. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya trend kearah perdagangan bebas yang memfasilitasi aktivitas pemasaran global.

4. Faktor persaingan (*competition drivers*)

Dalam sejumlah industri, keberhasilan pesaing yang melakukan “*go global*” bisa menjadi pendorong kuat bagi perusahaan lain untuk mengikutinya.

5. Faktor-faktor lain

Faktor 4C dari George S. Yip bisa dtambah dengan 3C lain yang tak kalah pentingnya sebagai pemicu globalisasi industri :

- *Communication technology advancement*, yakni revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi
- *Capital*, yakni menyangkut globalisasi pasar-pasar finansial.
- *Chain (network)*, terutama penyempurnaan dalam bisnis travel.

Berbagai teknologi telah dikembangkan para ilmuwan agar memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Mulai dari radio, telepon, televisi, hingga internet. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain pada tiap detik. Baik itu dengan orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal. Komunikasi tersebut bisa terjadi dengan dua arah maupun satu arah. Teknologi mulai dari radio hingga internet memungkinkan komunikasi yang sulit dilakukan menjadi bisa dilakukan. Salah satu dari sekian banyak temuan para ahli, yang fenomenal adalah media internet.

Internet dapat menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia baik itu yang belum mengenal atau yang sudah mengenal, baik itu dari suku, rasa atau agama yang berbeda, semuanya dapat berkomunikasi langsung melalui media internet. Sebab di dalam media internet memang banyak sarana pendukung bagi manusia untuk melakukan komunikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Tracy "...internet adalah semacam jagad raya yang terus menerus berkembang memiliki geografi, 'cuaca', dan budaya sendiri. Dalam dunia *cyber* ini, berbagai orang dalam penjuru dunia berkomunikasi melalui zona waktu yang berbeda tanpa saling bertatap muka, dan informasinya tersedia 24 jam sehari dari ribuan tempat".

Perusahaan multinasional menurut John H. Dunning adalah "*an enterprise that engages in foreign direct investment (FDI) and owns or, in some way, controls value-added activities in more than one country.*" Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah di lebih dari satu negara. Definisi tersebut menggambarkan kegiatan

perusahaan multinasional dalam dua karakteristik. Yaitu mengkoordinasikan seluruh masalah dalam satu struktur perusahaan dan memiliki bagian besar dalam transaksi ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas koordinasi lintas negara. Kedua karakteristik ini membedakan perusahaan multinasional dari perusahaan lainnya. Ketika disatu sisi terdapat perusahaan yang mengontrol dan mengkoordinasi produksi melalui banyak perusahaan dan disisi lainnya terdapat pula perusahaan melakukan transaksi ekonomi lintas negara maka perusahaan multinasional menggabungkan kedua aktivitas tersebut.¹²

Jing Sun menyebutkan bahwa terdapat lima kegunaan yang menyebabkan perusahaan multinasional dapat merubah harga penjualannya pada transaksi afiliasi yaitu transaksi yang melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki basis operasional dan sistem usaha yang identik/hampir sama, yaitu :¹³

1. Pelarian dana

Dibanyak negara, ketika mata uang lokal dan asing sering berfluktuasi, banyak perusahaan mencadangkan pendanaannya. Mereka mempunyai batas yang digunakan untuk membayar deviden dan deviden saham untuk investor luar negerinya. Pada saat tersebut, perusahaan multinasional seringkali merubah harga menjadi lebih tinggi untuk barang dan jasa yang dilakukan kepada afiliasinya di negara tersebut, melalui *fund shifting*.

¹² John H. Dunning, *Multinational Enterprise and Global Economy*, Addison Wesley, New York, 1993, hal.113-114.

¹³ Jin sun He, "The Global Enterprises and Capitalism Issue", dalam Dunning, Ibid.

2. Menghindari pajak

Kebanyakan praktek yang dilakukan adalah penghindaran pajak penghasilan dan bea cukai. Untuk mengurangi bea dan cukai, meskipun perusahaan local tidak dapat mengurangi tarif cukai tersebut, namun mereka dapat merubah harga sesuai keinginannya, yang biasanya dilakukan dengan dua cara :

- a. Menggunakan cukai gabungan dan manipulasi perjanjian untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Menggunakan perusahaan afiliasi di negara yang berbeda, menjual barang yang rendah untuk harga yang lebih tinggi untuk mengurangi pajak yang utama dan pajak yang dibayar dan mengurangi pajak impor perusahaan afiliasi serta menggunakan perbedaan tarif pajak antara dua negara.

3. Menyesuaikan laba

Ketika perusahaan afiliasi mendapatkan laba yang tinggi di negaranya, biasanya akan menimbulkan banyak permasalahan. Sebagai contoh, serikat pekerja akan menuntut kenaikan gaji. Perusahaan multinasional akan dapat menggunakan kekuatan pembelian dan penjualan yang dimilikinya dengan pengertian yang penuh, mengurangi laba perusahaan afiliasi dengan merubah harga, mengurangkan laba yang sebenarnya dan menyamarkan laba yang sebenarnya, menghilangkan keuntungan negara domisili afiliasi yang sebenarnya harus diterima.

4. Mengurangi pembatasan kuota

Kuota berhubungan dengan kuantitas produk dan nilai produk. Perusahaan multinasional dapat merubah harga untuk mengurangi batas kuota. Contohnya adalah ketika perusahaan ekspor afiliasi mengurangi harga barang, maka perusahaan empur afiliasinya tidak akan membutuhkan banyak kuota, yang dapat menaikkan kualitas barang yang diimpor.

5. Melakukan keuntungan kompetisi

Ketika perusahaan afiliasi dibentuk diluar negeri, perusahaan multinasional akan menggunakan kekuatan dananya untuk mensuplai bahan baku, produk dan jasa dengan harga yang relatif murah, dan membeli produk dengan harga tinggi untuk membantu perusahaan afiliasi membentuk nama baik dan pertumbuhan yang stabil. Ketika kompetisi pasar di luar negeri sangat ketat, perusahaan pemasok afiliasi akan menggunakan harga yang lebih rendah untuk membantu perusahaan afiliasinya sampai pesaing dikalahkan dan menguasai pasar.

Penghindaran pajak merupakan pemotongan atau pengurangan kewajiban pajak perusahaan. Dalam definisi luas, penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak (*tax planning*), karena secara ekonomis berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*). Pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Dalam rangka meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan

(*lawful*) yang sering disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).¹⁴

Dalam penelitian Hoque diungkapkan beberapa cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seperti :¹⁵

- 1) Menampakkan laba dari aktifitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

WTO dengan predecessor, GATT telah berhasil menurunkan tariff, kuota dan instrumen proteksi lainnya. Hal ini menyebabkan perhatian pelaku perdagangan beralih dari hambatan tariff yang merupakan hambatan di perbatasan menjadi regulasi domestic non tariff yang berada setelah perbatasan "*behind the border*", terutama mengenai keberagaman standar produk yang diberlakukan oleh pemerintah suatu

¹⁴ Winnick and Dyreng, *Advances in Taxation*, Rouledge Publishing, London and New York, 2009, hal.9.

¹⁵ *Ibid*, hal.36.

Negara. Robert E Baldwin menyebutkan, *“the lower of tariff has, in effect, been like draining a swamp. The lower water level has revealed all the snag and stump of non-tariff that still has to be cleared away”*.

Standar produk biasa disebut dengan *Technical Barrier to Trade* dalam terminologi perdagangan internasional. Meskipun pengaruh dari standar produk sulit untuk ketahu, tapi telah ada kesepakatan mengenai hambatan yang terhadap arus perdagangan internasional. Untuk mengah standar produk menghambat perdagangan internasional GATT/WTO telah membuat aturan dan kebijakan yaitu dari GATT menjadi *Technical Codes* di Tokyo Round dan terakhir TBT agreement. Standar produk mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial. Hampir semua ekonomis sepakat bahwa regulasi yang baik merupakan hal yang tidak terpisahkan untuk memastikan lancarnya perdagangan bebas. Merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga *“economic externalities”*, menyediakan barang yang baik, dan memproteksi nilai-nilai yang penting dalam masyarakat. (*domestic regulatory autonomy under tbt agreement: from non discrimination to harmonization*).

Pada konsorsium WTO tahun 2012 di New York yang bertajuk *“Connecting to Global Market”* berhasil disepakati bahwa produk layanan internet merupakan bagian dari obyek perdagangan. Artinya produk internet, meliputi situs pencari layanan program, surat elektronik, web site informasi yang memang secara nyata merupakan bagian dari kreasi manusia yang memiliki nilai tersendiri. Berbagai

program layanan internet menjadi program nyata yang dapat disejajarkan dengan program akutansi, game (permainan) dan lain-lainnya.¹⁶

Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.¹ Seorang ahli, James E. Anderson merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.² Fiskal yaitu 1) berhubungan dengan soal-soal finansial Fiskal yaitu 1) berhubungan dengan soal-soal finansial; 2) pada waktu ini istilah fiskal digunakan dalam arti khusus yang berlawanan dengan istilah “moneter”. Fiskal berhubungan dengan “fisc” yaitu aspek finansial pemerintah,³ sedangkan *fiscal policy* (kebijakan fiskal) adalah suatu instrumen manajemen permintaan (*demand management*) yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak (*taxation*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*).¹⁷

Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam

¹⁶ Barry Axford, *op,cit.*

¹⁷ Collins, *Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpul Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Airlangga, 1994, hal. 232.

konsep makro disebut dengan *government expenditure*).¹⁸ Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.¹⁹

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan secara kualitatif dalam menganalisis dan mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menekankan pada pentingnya pemahaman tentang pentingnya peran negara dalam membatasi peran MNC dalam aktivitas ekonomi. Adapun metode yang digunakan dalam memahami kasus adalah metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan metode yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem, baik berupa peristiwa, sekelompok individu, maupun kegiatan yang terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Penelitian diarahkan untuk meneliti keadaan, menghimpun makna, dan memperoleh pemahaman terhadap suatu isu. Metode studi kasus tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan terhadap suatu populasi dan tidak merepresentasikan keseluruhan populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti karena setiap kasus berbeda antara satu dengan yang lainnya.²⁰

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution, *et. al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, hal. 203

¹⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hal. 159

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hal.57.

1.6.2. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistemik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena data digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Pengumpulan data selalu memiliki hubungan dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak dapat dipecahkan karena metode untuk pengumpulan data tidak memungkinkan atau metode ada tidak dapat menghasilkan data yang diinginkan.²¹

Menurut John W, Cresweil Data yang dikumpulkan haruslah cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambilan data cukup valid. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural seting), laboratorium untuk eksperimen, dirumah untuk berbagai responden, seminar, dikusi, dan lain-lain.

Jika dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder juga dapat disebut dengan teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data

²¹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes* (Edisi ke-3). Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.41.

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.

Untuk mendukung proses penelitian, akan digunakan pengumpulan data secara sekunder yaitu dengan studi kepustakaan dan observasi. Studi kepustakaan akan diambil dari buku, jurnal, majalah, dan situs resmi. Data penelitian dan observasi akan dilakukan dengan melihat dinamika rekaman data berbahasa Inggris yang berkaitan dengan penelitian terhadap upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Inggris dalam menangani penghindaraan pajak yang dijalankan oleh *Google Corporation* di Inggris.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi kedalam lima bagian dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tren perkembangan perusahaan berbasis internet, serta sejarah dan profil *Google Corporations*.

Bab III membahas tentang sistem perpajakan di Inggris, serta kasus-kasus penghindaran pajak *Google Corporations* dan upaya-upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Inggris dalam menangani penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan tersebut Inggris.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya.